

DAFTAR RANCANGAN DAN TAHAPAN PEMBUATAN PERATURAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TAHUN 2025

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan, Holding Perkebunan Nusantara menyusun Daftar Rancangan Peraturan dan Tahapan Pembentukannya Tahun 2025. Dokumen ini memuat daftar kebijakan, peraturan, dan SOP yang tengah dirancang oleh berbagai divisi, lengkap dengan status tahapan penyusunannya. Informasi ini diharapkan menjadi acuan dalam memastikan setiap regulasi yang ditetapkan selaras dengan kebutuhan bisnis, kepatuhan hukum, serta praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel

[DOKUMEN SELENGKAPNYA →](#)

**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
DAN TAHAPAN PEMBENTUKANNYA TAHUN 2025**

No.	Judul Peraturan/Kebijakan	Penanggung Jawab	Tahapan
1	Peraturan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis	Divisi Sekretariat Perusahaan	dalam proses reviu oleh DHKM
2	SOP tentang Keprotokoleran Pelayanan Tamu VIP di Bandar Udara	Divisi Sekretariat Perusahaan	dalam proses penyusunan
3	Pedoman Tata Keprotokolan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara Group	Divisi Sekretariat Perusahaan	dalam proses penyusunan
4	Prosedur Kerja Sama Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap dilingkungan Perkebunan Nusantara Group	Divisi Manajemen Aset	dalam proses reviu oleh DHKM
5	Kepdir tentang Pelunasan Lebih Awal Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Dari PT Perkebunan Nusantara IV	Divisi Keuangan Strategis dan Pembiayaan Korporasi	dalam proses reviu oleh DHKM
6	Peraturan Direksi tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi	Divisi Transformasi Strategis & Sustainability	dalam proses reviu oleh DHKM
7	SOP Perencanaan Manajemen Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
8	SOP Integrasi Risiko ke RJP, RKAP, dan KPI	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
9	SOP Identifikasi Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
10	SOP Kuantifikasi dan Analisis Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
11	SOP Evaluasi Risiko dan Prioritisasi Risiko	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
12	SOP Rencana Perlakuan Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
13	SOP Integrasi dan Agregasi Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
14	SOP Pemantauan dan Tinjauan Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
15	SOP Pelaporan Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
16	SOP Sistem Informasi Manajemen Risiko (ERIN).	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
17	SOP Manajemen Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management System/ BCMS).	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
18	SOP Pengembangan dan Pengujian Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
19	SOP Stress Testing.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
20	SOP Internal Control Testing.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
21	SOP Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index/ RMI).	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
22	SOP Kajian Manajemen Risiko atas Aksi Korporasi.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses

			penyusunan
23	SOP Manajemen Kepatuhan.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
24	SOP Komunikasi dan Konsultasi Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
25	Perubahan Struktur Organisasi PTPN III (Persero)	Divisi Sumber Daya Manusia	dalam proses pembahasan dengan Dekom
26	Penghasilan Th 2025 dan Tantiem/Insentif Kinerja Th Buku 2024	Divisi Sumber Daya Manusia	dalam proses pembahasan dengan Direksi
27	Peraturan Perjalanan Dinas Karyawan di Lingkungan PTPN Grup	Divisi Sumber Daya Manusia	dalam proses pembahasan sub Holding
28	Peraturan Perjalanan Dinas Direksi, Dewan Komisaris, dan Region Head di Lingkungan PTPN Grup	Divisi Sumber Daya Manusia	Dalam Proses Drafting
29	Ketentuan tentang Penetapan Imbal Hasil atas keterlambatan pembayaran iuran Dana Pensiun Perkebunan	Divisi Sumber Daya Manusia	dalam proses reviu oleh DHKM
30	Kebijakan Akuntansi Perkebunan (Update Peraturan Baru)	Divisi Akuntansi dan Perpajakan	dalam proses penyusunan
31	Peraturan Direksi Terkait Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	DHKM / DPTI	<i>On Process</i>
32	Peraturan Direksi Recovery Aset	Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum	dalam proses penyusunan
33	Surat Edaran Tata Kelola PMN	DIPA	dalam proses penyusunan
34	Surat Edaran Kebijakan Pembayaran Dividen	DIPA	dalam proses penyusunan
35	Surat Edaran Indikatif Harga Waste di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group	Divisi Transformasi Strategis & Sustainability	dalam proses reviu oleh DHKM
36	SKPTS Penetapan Digital Champion	Digital Transformation Office	dalam proses reviu oleh DHKM
37	SOP Komunikasi dan Konsultasi Risiko.	Divisi Manajemen Risiko	dalam proses penyusunan
38	Peraturan Direksi Tentang SOP Kerja Sama Penelitian Bidang Perkebunan di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group	DOSK	dalam proses <i>review</i> oleh DHKM
39	SOP Perencanaan Bidang Tanaman	DOSK	dalam proses persetujuan
40	SOP Persiapan Tanaman	DOSK	dalam proses persetujuan
41	SOP Pemeliharaan Tanaman	DOSK	dalam proses persetujuan
42	SOP Pemeriksaan Tanaman	DOSK	dalam proses persetujuan
43	SOP Panen Produksi	DOSK	dalam proses persetujuan
44	SOP Pengangkutan Produksi	DOSK	dalam proses persetujuan

45	SOP Pemupukan Tanaman Kelapa Sawit & Karet	DOSK	dalam proses persetujuan
46	SOP Monitoring dan Evaluasi Anak Perusahaan	DOSK	dalam proses persetujuan
47	SOP Identifikasi, Penilaian, Pengelolaan dan Pemantauan HCV	DOSK	dalam proses persetujuan
48	SOP Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat	DOSK	dalam proses persetujuan
49	SOP Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	DOSK	dalam proses persetujuan
50	Peraturan Direksi tentang Pedoman Tata Kelola Hubungan Kelembagaan di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group	Divisi Hubungan Kelembagaan dan Hukum	dalam proses review

Secara umum, tahapan dalam setiap penyusunan peraturan di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara diantaranya sebagai berikut:

1. Divisi pemrakarsa merumuskan draft peraturan atau kebijakan;
2. Divisi pemrakarsa menyampaikan permintaan review atas draft peraturan kepada Divisi Hukum dilengkapi dengan dokumen pendukung dan masukan dari divisi lainnya jika ada;
3. Proses review oleh Divisi Hukum serta proses koordinasi dengan divisi pemrakarsa;
4. Penyampaian review final atas draft peraturan kepada divisi pemrakarsa;
5. Proses persetujuan Direksi/Pejabat yang berwenang;
6. Pengesahan peraturan;
7. Distribusi peraturan dan/atau sosialisasi jika diperlukan;
8. Pengarsipan.